

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan data penelitian dan hasil pembahasan di atas, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Seluruh jenis pajak daerah yang ada di Kota Kupang termasuk dalam sektor terbelakang dimana pajak daerah tersebut persentasenya berada di bawah rata-rata dan pertumbuhannya kecil serta potensi dan kemampuan mengelola rendah.
2. Pajak penerangan jalan memiliki potensi terbelakang yang berada IV dengan kontribusi sebesar 0,401% dan laju pertumbuhan sebesar 0,035%.
3. Sektor pajak penerangan jalan memiliki kontribusi yang paling besar diantara jenis pajak daerah lainnya namun memiliki laju pertumbuhan paling kecil diantara jenis pajak daerah lainnya.

### **6.2 Saran**

Beberapa strategi yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan memperbaiki sistem pengumpulan pajak daerah seperti:

1. Pemerintah Daerah harus terus mengevaluasi dan meningkatkan kinerja aparat dalam menggali secara lebih intensif penerimaan Pajak Daerah agar penerimaan Pajak Daerah dapat terus meningkat setiap tahunnya.

2. Penentuan target penerimaan pajak seharusnya menggunakan perhitungan yang matang agar saat pencapaian realisasi tidak terlalu terpaut jauh dan terkesan sulit untuk mencapai target tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba Empat
- Abdul Halim. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat
- Alam Pradita. 2009. *Analisis Potensi Pengembangan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang*. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Harun, Hamrolie. 2003. *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta: BPFE
- <http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/konsep-peningkatan-pajak-retribusi-daerah.html>
- <http://abstraksiekonomi.blogspot.co.id/2013/07/intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak.html>
- <http://junaidichaniago.blogspot.co.id/2009/05/mengenal-tipologi-klassen-seri-1.html>
- Insukindro.1992. “*Pembentukan Model Dalam Penelitian Ekonomi*”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. No.1, tahun VII.BPFE-UGM
- Kadariah. 1985. *Ekonomi Perencanaan*, Lembaga Penerbit FE-UI
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan, Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Mahmudi, 2007, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Miyasto. 1997. *Sistem Perpajakan Nasional dalam Era Ekonomi Global*. Semarang: Diponegoro University Press

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001. *Tentang Pajak Daerah*. Departemen Dalam Negeri
- Sekaran, Uma. 2006. *Metode Penelitian Bisnis 2 Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat
- Siahaan P, Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Grafindo
- Simanjuntak. 2001. *Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah*. Bunga Rampai Keuangan Daerah. Yogyakarta : AMP YKPN
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan*, LP3ES UI, Jakarta
- Sukirno, Sadono. (2011). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Sukriah. 2004. “*Pariwisata Sebagai Sektor Unggulan Kota Bandung* . *Jurnal Manajemen Resort & Leisure*. Vol. 11, No. 1, April 2014
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. *Tentang Pemerintah Daerah*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999. *Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*. Dewan Perwakilan Rakyat dan Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000. *Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia